



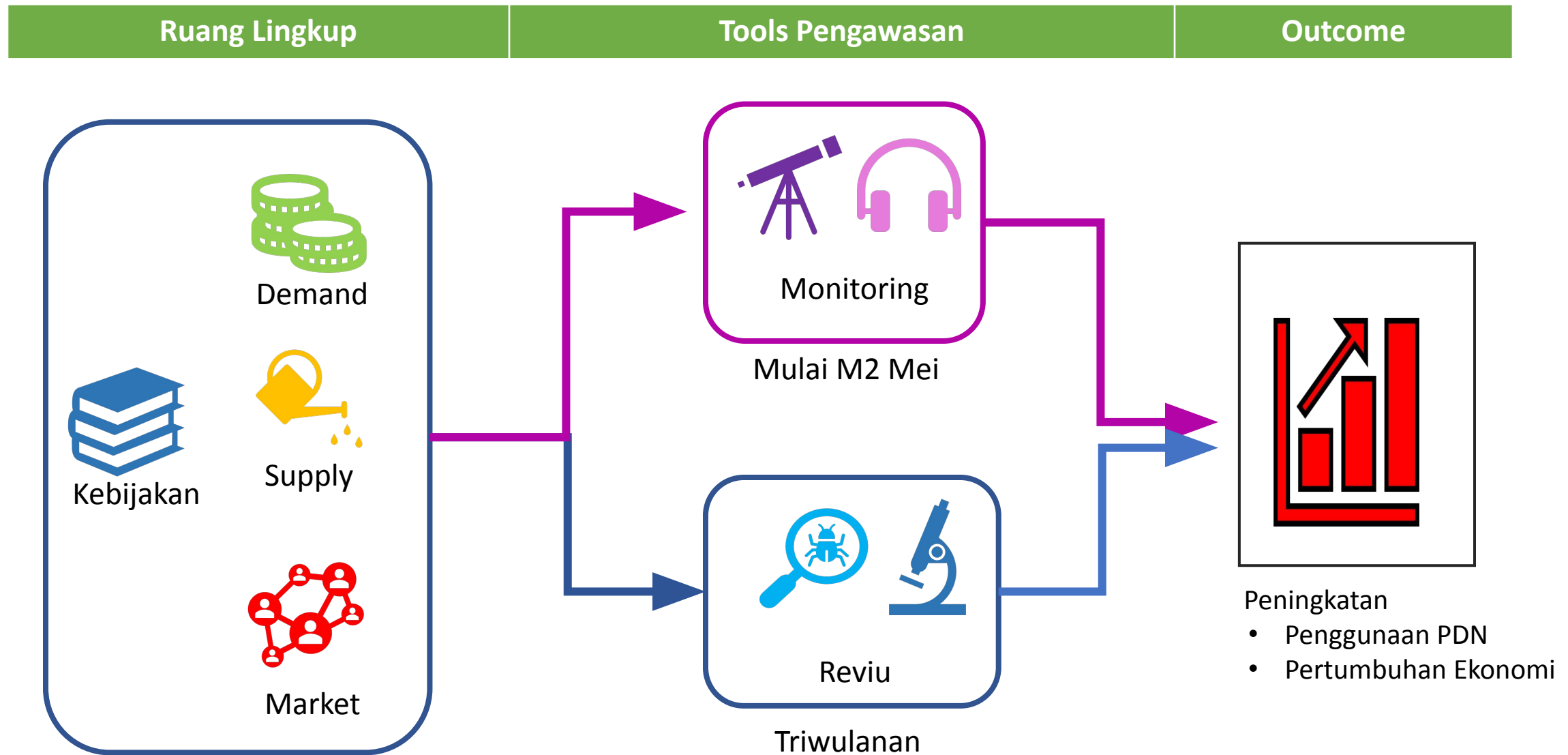
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN P3DN (SISWAS P3DN) PADA PEMERINTAH DAERAH



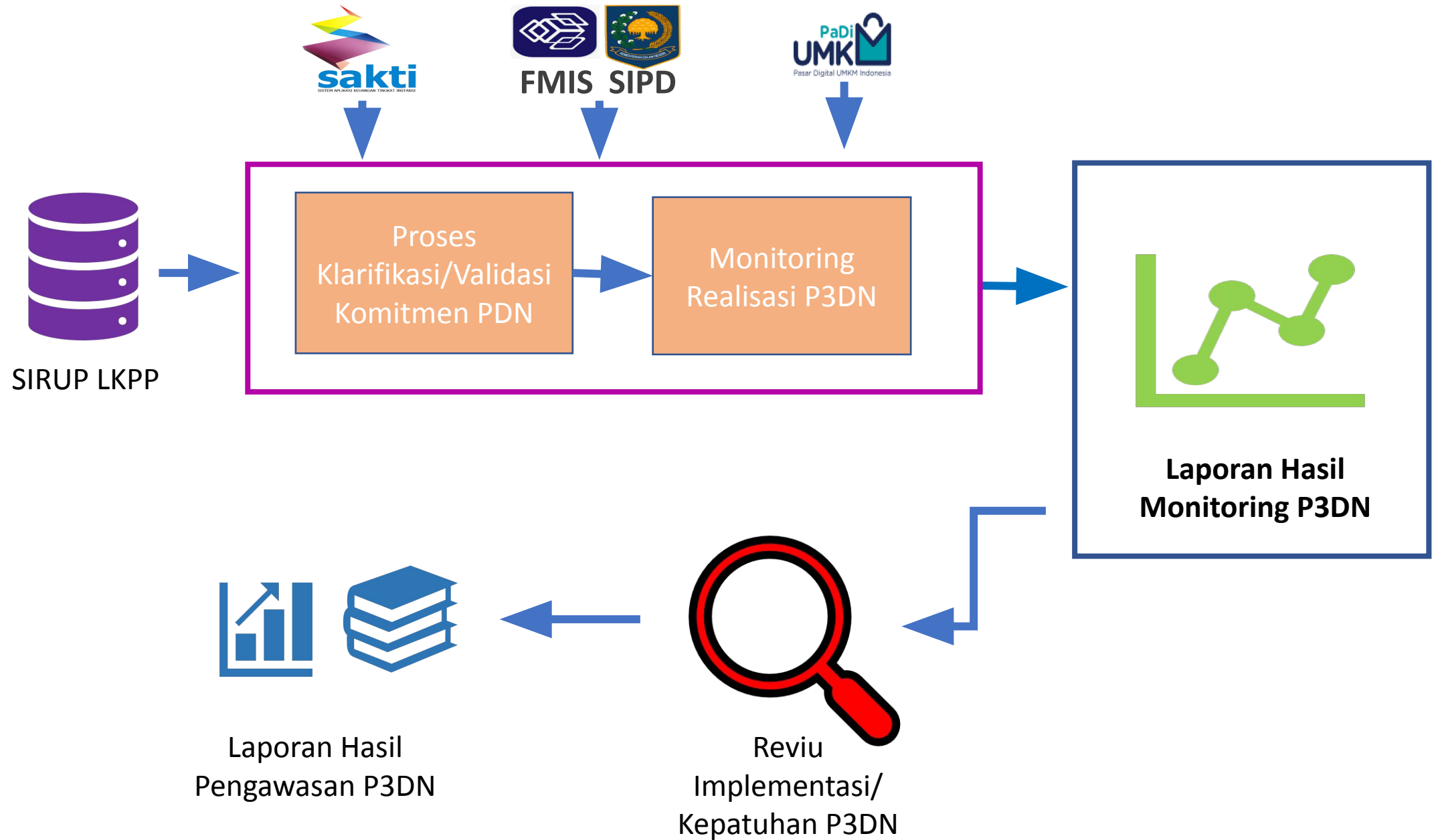
Sosialisasi Pedoman Monitoring
P3DN Daerah dan Sistem Informasi
Pengawasan P3DN pada
Pemerintah Daerah



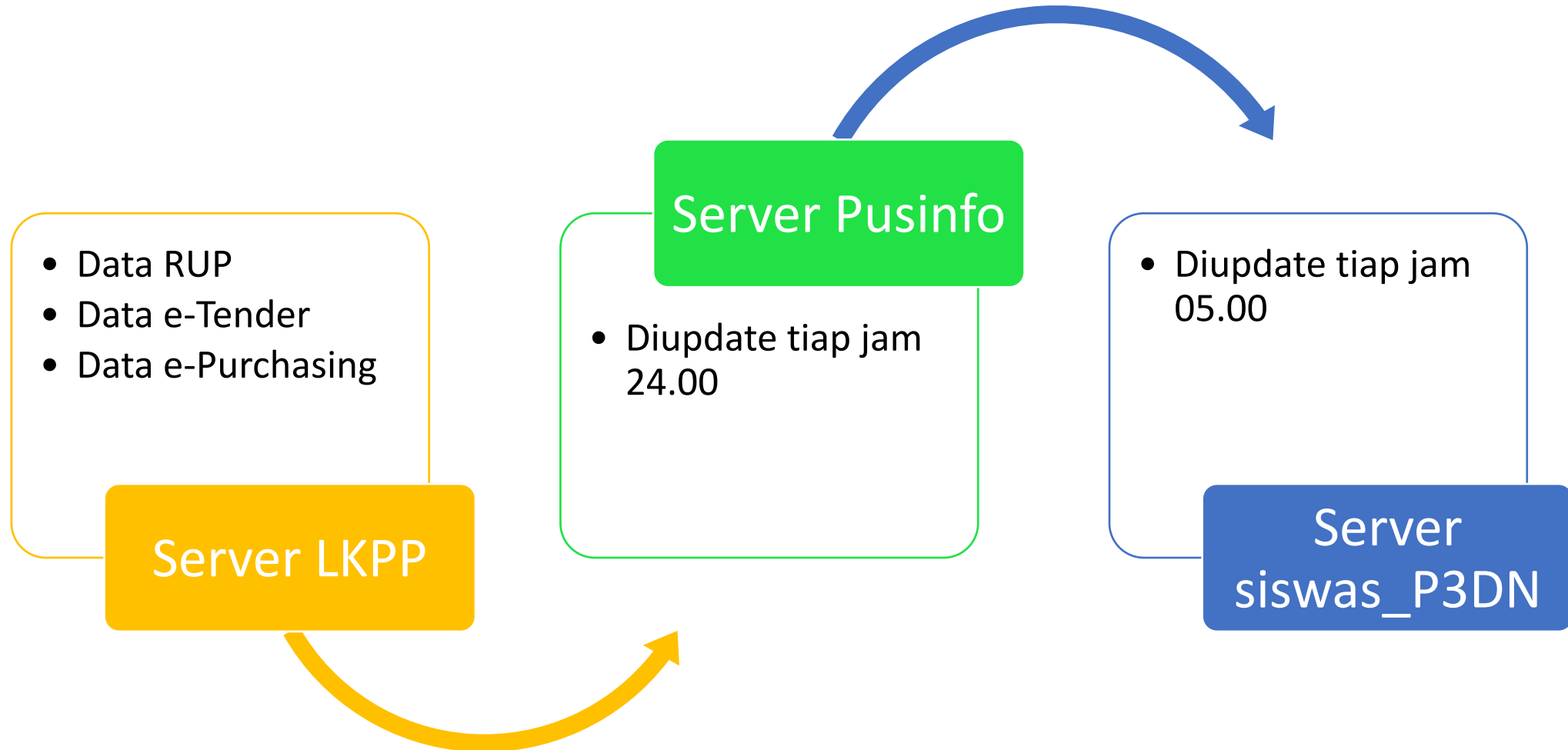
PENGAWASAN P3DN



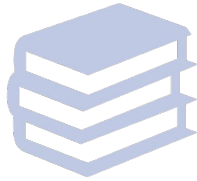
PROSES BISNIS



Alur update data dari LKPP



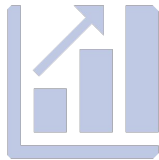
Tujuan Monitoring



Memperoleh *update* kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN.



Memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yg terklarifikasi (valid)

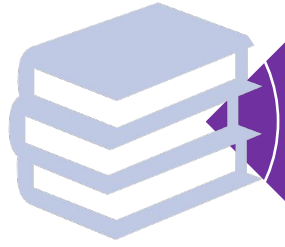


Memantau *progress* realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah; dan



Memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah

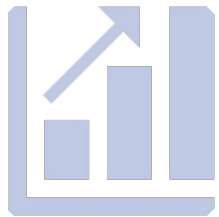
Informasi Hasil Pengawasan Yang Diharapkan



Kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN yang paling update.



Nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yg terklarifikasi



Progress realisasi komitmen belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah yg berkelanjutan

Pihak Yang Terlibat Aplikasi Monitoring

UKPBJ

- Admin Pemda
- Menyiapkan Akun Pemda

PPKom

- Klarifikasi PDN berikut alasannya
- Input Realisasi PBJ dan PDN

APIP

- Update Kebijakan
- Verifikasi Kelengkapan Data
- Submit Ikhtisar Hasil Monitoring Pemda

Perwakilan BPKP

- Verifikasi kelengkapan Ikhtisar Hasil Monitoring Pemda
- Subkit Ikhtisar Hasil Monitoring se- Provinsi

Deputi PPKD/Itjen
Kemendagri/Kemenko Marinvest

- Monitoring Progres P3DN Daerah Seluruh Indonesia
- Sintesa Hasil Pengawasan

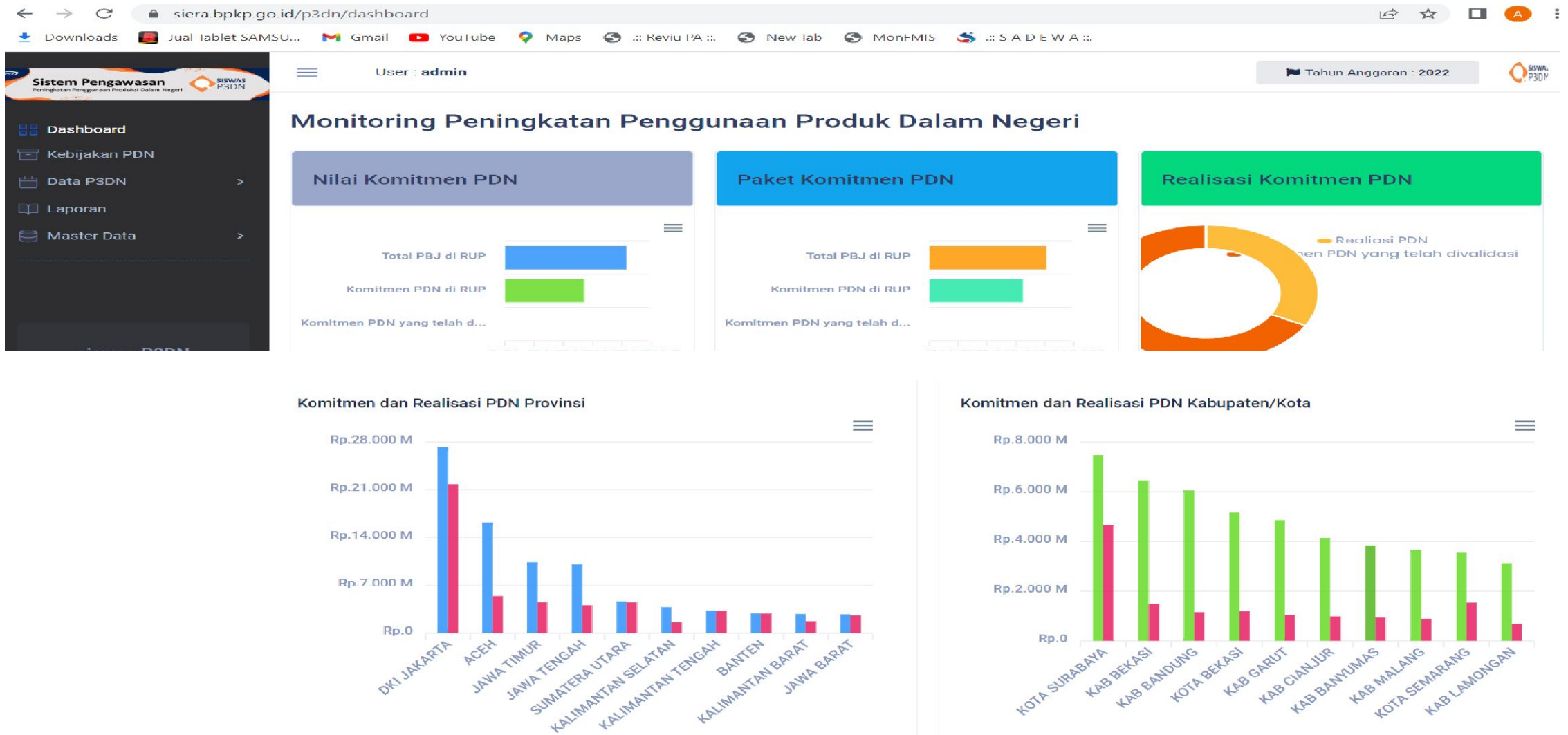
MEKANISME KERJA

1. Perwakilan BPKP berkoordinasi dengan APIP dan UKPBJ Daerah terkait pelaksanaan monitoring P3DN.
2. UKPBJ mengkoordinasikan penginputan data oleh PPKom.
3. Penginputan *update* data kebijakan P3DN dilakukan APIP Daerah.
4. Penginputan data klarifikasi komitmen P3DN dilakukan PPKom.
5. Penginputan data realisasi P3DN dalam PBJ Daerah dilakukan PPKom.
6. APIP melakukan monitoring kelengkapan penginputan data yang dilakukan PPK bersama UKPBJ.
7. APIP menyampaikan hasil monitoring P3DN setiap akhir pekan kepada kepala daerah.
8. Perwakilan BPKP memonitor penginputan yang dilakukan APIP, PPK dan UKPBJ.
9. Perwakilan BPKP mengirimkan ikhtisar hasil monitoring secara mingguan ke Deputi Bidang PPK
10. Laporan tertulis dibuat secara bulanan oleh APIP dan Perwakilan BPKP

URUT-URUTAN LANGKAH TEKNIS KERJA

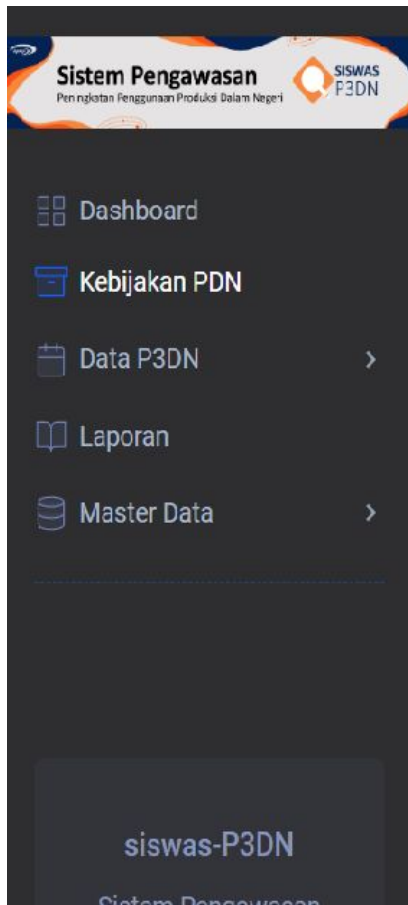
- Perwakilan BPKP akan membuat user dan password untuk Admin Pemda (UKPBJ) ☐ **Admin Pemda dibuat tanpa menyebut OPD.**
- Perwakilan juga dapat membuat user untuk Tim Monitoring Perwakilan (tanpa memilih Pemda).
- Admin Pemda (UKPBJ) membuat user dan password untuk APIP dan PPKom tiap OPD.
- Khusus Inspektorat akan mempunyai **2 akun** yi sbg APIP (**tanpa OPD**) dan PPKom.
- APIP memutakhirkan data kebijakan P3DN, dan alasannya jika kebijakan tersebut belum ada.
- PPKom mengklarifikasi komitmen PDN berikut menginput alasan/ dasar menyatakan pengadaan sebagai PDN atau harus impor.
- PPKom menginput progress PBJ sd minggu berkenaan.
- UKPBJ sebagai Admin memonitor penginputan PPKom.
- APIP memonitor progress penginputan PPKom.
- APIP mensubmit Ikhtisar Monitoring P3DN setiap akhir pekan.
- APIP melaporkan secara tertulis kepada kepala daerah setiap akhir bulan.
- Perwakilan BPKP memonitor penginputan se-provinsi.
- Perwakilan BPKP mensubmit Ikhtisar Monitoring P3DN se Provinsi.
- Perwakilan BPKP melaporkan secara tertulis kepada Deputi PPKD setiap akhir bulan.

DASHBOARD SISWAS P3DN



Update Kebijakan P3DN

Untuk mendapatkan update data kebijakan P3DN Pemda berikut alasannya jika belum ada kebijakan tersebut,



Rekapitulasi Kebijakan

Rincian Kebijakan

Apakah Pemerintah Daerah Telah Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) ?

Ya

Tidak

Catatan Tidak Menetapkan SK

Belum di bentuk TIM P3DN

Apakah Pemerintah Daerah Telah Menetapkan Pengelola e-katalog lokal ?

Ya

Tidak

Catatan Tidak Membentuk Tim

Belum di bentuk Tim e-katalog lokal

Apakah Kepala Daerah Telah Menekankan Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam bentuk kebijakan ?

Ya

Tidak

Move notification to Notification

KLARIFIKASI KOMITMEN PDN

Mendapatkan data terklarifikasi komitmen belanja produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan data RUP.

No	Id RUP*)	Paket/ Rincian Pengadaan*)	Metode Pengadaan*)	Rencana Anggaran (RUP) (Rp)	Nilai PDN Dalam RUP*) (Rp)	Estimasi % TKDN**)	Alasan PDN (wajib diisi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	113	Paket Pengadaan Komputer	E-Katalog	200.000.000	200.000.000	40%	Rencana Merk Zyrex TKDN 40%
2.	114	Paket Pengadaan Alat Musik	E-Tender	250.000.000	250.000.000	100%	Alat musik tradisonal (angklung)
3.	115	Paket Pengadaan Sound System	E-Tender	300.000.000	300.000.000	0%	Barang impor

REALISASI PBJ dan P3DN

Mendapatkan nilai realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ daerah untuk mengevaluasi progress komitmen P3DN

No	Id RUP	Paket/Rincian Pengadaan	Nilai Realisasi Pengadaan (Rp)	Realisasi Barang Diterima (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	% Realisasi TKDN
1	2	3	4	5	6	7
1.	113	Paket Pengadaan Komputer	175.000.000	100.000.000	50.000.000	
		Zyrex NF5 Cruise	100.00.000	100.000.000	50.000.000	40%
		Dell TC33	75.000.000	0	0	0%
2.	114	Paket Pengadaan Alat Musik	250.000.000	250.000.000	0	100%
3.	115	Paket Pengadaan Sound System	275.000.000	0	0	0

TERIMA KASIH



*hadir bermanfaat
Kian bermakna*

